

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBERIAN UANG PESANGON

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Makasar Atas Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Makasar)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk tugas akhir

SKRIPSI

PROGRAM STUDI HUKUM



Disusun oleh :

VISKA ADITYA NINGRUM PRAMESWARI

211200021

HUKUM PERDATA

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JAKARTA

2025

LEGAL ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN THE CASE OF
SEVERANCE PAYMENT

(Case Study of the Makassar District Court Regarding Decision No. 6/Pdt.Sus-
PHI/2023/PN.Makasar)

Submitted as one of the requirements for the final assignment

THESIS

LAW STUDY PROGRAM



Compiled by:

VISKA ADITYA NINGRUM PRAMESWARI

211200021

CIVIL LAW

SATYA NEGARA INDONESIA UNIVERSITY
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

JAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa tugas akhir ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 11 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



(Viska Aditya Ningrum P)

211200021

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : VISKA ADITYA NINGRUM PRAMESWARI

NIM : 211200021

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PERKARA PEMBERIAN
UANG PESANGON (Studi Kasus Pengadilan
Negeri Makasar Atas Putusan No.6/Pdt.Sus-
PHI/2023/PN.Mks)

PEMINATAN : Hukum Perdata

Telah disetujui oleh tim pembimbing untuk diajukan dalam Sidang Skripsi.

Jakarta, 30 Juli 2025

Menyetujui

Pembimbing I



(Dr. Ernawati, SHI., MH)

Pembimbing II



(Dr. Untoro, SH., MH)

Mengetahui

Ketua Program Studi



(Burhanudin Yusuf, S.H., M.H. C.Med)

Dekan Fisip



(Fahlesa Munabari, M.A., Ph.D)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : VISKA ADITYA NINGRUM PRAMESWARI
NIM : 211200021
JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PERKARA PEMBERIAN
UANG PESANGON (Studi Kasus Pengadilan
Negeri Makasar Atas Putusan No.6/Pdt.Sus-
PHI/2023/PN.Mks)

PEMINATAN : Hukum Perdata

Jakarta, 11 Agustus 2025

Menyetujui,

Ketua Penguji : Dr. Ernawati, SHI., MH ()
Anggota Penguji I : Retmontari, S.H., M.H. ()
Anggota Penguji II : Burhanudin Yusuf, S.H., M.H. C.Med ()

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dekan Fisip


(Burhanudin Yusuf, S.H., M.H. C.Med)


(Fahlesa Munabari, M.A., Ph.D)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT sebab atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pemberian Uang Pesangon (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makasar Atas Putusan No 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Makasar)” yang merupakan salah satu syarat untuk tugas akhir skripsi Prodi Hukum Universitas Satya Negara Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Sihar P.H Sitorus B.S.B. A., M.BA, selaku Rektor Universitas Satya Negara Indonesia.
2. Bapak Fahlesa Munabari, M.A.,Ph.D., selaku Dekan FISIP Universitas Satya Negara Indonesia.
3. Bapak Burhanudin Yusuf, S.H., M.H. C.Med., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Satya Negara Indonesia.
4. Ibu Dr. Ernawati, SHI, MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Untoro, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Jurusan Hukum Universitas Satya Negara Indonesia yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis yang sebagian besar tertuang di dalam skripsi ini.
7. Teristimewa untuk orang tua, ayah dan ibu yang selalu mendukung dan membantu, selaku penyemangat hidup serta doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
8. Untuk kakak penulis Shintia dan Riska serta adik penulis Nola dan Ajeng yang selalu memberikan dukungan moral, moril, materil dan tiada hentinya mengingatkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman seperjuangan di kampus tercinta Prodi Hukum Universitas Satya Negara Indonesia.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, terkhusus kepada penulis sendiri dan para pengajar dibidang hukum sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan dan pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

ABSTRAK

Uang pesangon adalah uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Ada beberapa faktor yang menjadi dampak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), salah satunya karena pekerja memasuki usia pensiun. Pada saat Pemutusan Hubungan Kerja terjadi maka secara bersamaan muncul kewajiban pengusaha untuk membayarkan hak pekerjaannya berupa uang pesangon. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk menganalisis gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan Undang-Undang yang berlaku dan untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara pemberian uang pesangon atas putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Makasar. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan studi kasus (*case approach*) adalah pendekatan ini memiliki tujuan untuk mempelajari dan memahami norma hukum yang dapat diterapkan melalui studi kasus yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Makasar, hakim menimbang beberapa fakta hukum yang terungkap pada saat persidangan dimana adanya kekeliruan klaim yang dilakukan oleh penggugat, mengenai masa kerja serta besaran uang pesangon yang dituntutkan oleh penggugat kepada tergugat, selain itu hakim juga memutuskan perhitungan uang pesangon menggunakan upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur setempat, bukan berdasarkan gaji terakhir yang penggugat terima. Pada perkara ini yang dimana penggugat menggugat besaran uang pesangon dikarenakan penggugat memasuki usia pension, maka hakim menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Kata Kunci : Uang Pesangon, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pengadilan Negeri, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Severance pay is money paid by the employer to the employee, by name and in any form, in connection with the end of the employment period or termination of employment (PHK), including long service award money and compensation money. There are several factors that impact the occurrence of Termination of Employment (PHK), one of which is because the worker enters retirement age. When Termination of Employment occurs, the employer's obligation to pay the worker's rights in the form of severance pay simultaneously arises. The purpose of this study is to analyze the lawsuit filed by the plaintiff with the applicable law and to analyze the considerations of the Industrial Relations Court Judge at the Makassar District Court in the case of granting severance pay based on decision No. 6 / Pdt.Sus-PHI / 2023 / PN.Makasar. The research method used in this thesis is qualitative, using a case study approach. This approach aims to examine and understand applicable legal norms through case studies that occur in society. The results of the study reveal the judge's considerations in Decision No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Makasar. The judge considered several legal facts revealed during the trial, including errors in the plaintiff's arguments regarding the length of service and the amount of severance pay the plaintiff demanded from the defendant. Furthermore, the judge decided to calculate the severance pay using the minimum wage set by the local governor, rather than the plaintiff's final salary. In this case, where the plaintiff sued for severance pay due to his retirement age, the judge applied Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment.

Keywords : *Severance Pay, Termination of Employment (PHK), District Court, Judge's Consideration*